



## Pemilihan Umum 2020 dan Covid-19 Dalam Perspektif Program Riset

**Nini Andriani**<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Menengah Pertama YPS Singkole, Indonesia

<sup>1</sup> nini.andriani@yps.sch.id\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 9 Mei 2021;*

*Revised: 1 Juni 2021;*

*Accepted: 2 Juli 2021.*

Kata-kata kunci:

Covid-19;

Pemilihan Umum;

Program Riset.

---

Keywords:

*Covid-19;*

*General Election;*

*Research Program.*

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak penyelenggaraan Pemilu 2020 yang telah dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Upaya menganalisis program riset terkait solusi penanganan terhadap dampak pelaksanaan Pemilihan Umum di tahun 2020 dalam perspektif Imre Lakatos. Hasil penelitian menemukan bahwa *hard core* atau kerangka kerja merupakan bagian yang terdiri atas hipotesis teoritis umum yang berguna untuk membentuk dasar teori ilmiah dan membentuk ciri khas dari suatu program riset. Oleh karena itu, kerangka ini termasuk ke dalam heuristik negatif. Perkembangan maupun perubahan metodologis yang mungkin muncul tidak akan dapat membantah atau memodifikasi isi dari inti pokok, sehingga akan terlindungi dari ancaman falsifikasi. Maka, ada beberapa poin dalam penelitian ini yang dikaitkan pada dampak penyelenggaraan Pemilu 2020 dalam masa pandemi Covid-19 yang berperan sebagai *hard core* dalam program riset ini, yaitu: pertama, pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap sektor pemerintahan. Kedua, perencanaan Pemilihan Umum 2020 yang dijadwalkan menuai kontra dari masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020 menimbulkan masalah ketidakadilan.

---

### ABSTRACT

***General Election 2020 and Covid-19 in the Perspective of Research Program.***

The purpose of this study is to describe the impact of the 2020 election that has been held during the Covid-19 pandemic. Efforts to analyze research programs related to solutions to the impact of the implementation of the General Election in 2020 in the perspective of Imre Lakatos. The results of the study found that the hard core or framework is a part consisting of general theoretical hypotheses that are useful for forming the basis of scientific theory and forming the characteristics of a research program. Therefore, this framework belongs to the negative heuristics. Developments or methodological changes that may arise will not be able to refute or modify the contents of the core, so that it will be protected from the threat of falsification. So, there are several points in this study that are associated with the impact of holding the 2020 Election during the Covid-19 pandemic that act as a hard core in this research program, namely: first, the Covid-19 pandemic has an influence on the government sector. Second, the planning of the 2020 General Election which is scheduled to reap cons from the public. Third, the holding of the 2020 General Election raises the problem of injustice.

---

**Copyright © 2021 (Nini Andriani). All Right Reserved**

How to Cite : Andriani, N. (2021). Pemilihan Umum 2020 dan Covid-19 Dalam Perspektif Program Riset. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(2), 39–44. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome/article/view/421>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-COV-2 telah melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Penyebarannya yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sektor kesehatan publik bukan satu-satunya sektor yang terdampak oleh pandemi ini, melainkan juga sektor pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hingga pemerintahan. Dalam sektor pemerintahan sendiri, sejumlah agenda terpaksa harus mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19 dan tentu menimbulkan permasalahan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari agenda pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2020 lalu. Indonesia menjadi salah satu negara yang memilih untuk menjadwalkan ulang pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Pemilu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang semula akan diadakan pada 23 September 2020, harus diundur hingga 9 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (Sarjan, dkk. 2020:61).

Keputusan untuk tetap mengadakan Pemilu ini tentunya memunculkan pro dan kontra dari masyarakat. Keputusan tersebut dikarenakan peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang masih belum kunjung reda, agenda pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 (Wisnaeni, 2020). Hal ini dinilai tidak realistis. Masyarakat dan pihak pakar penyakit menular merasa khawatir dengan potensi kemunculan kluster baru penyebaran virus (Cahyadi, & Hermawan, 2021). Hal ini berpotensi memunculkan masyarakat yang Golput (Golongan Putih) atau tidak menggunakan hak pilihnya. Mohamad, dkk. (2021:128) mengungkapkan bahwa hanya sains yang mampu melakukan telaah secara *close reading* (pembacaan dekat) terhadap pandemi ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengamati peristiwa Pemilu dalam pandemi Covid-19 melalui perspektif program riset Imre Lakatos.

Rumusan masalah penelitian ini untuk memberi gambaran tentang dampak penyelenggaraan Pemilu 2020 yang telah dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini berupaya mengkaji program riset terkait solusi penanganan terhadap dampak pelaksanaan Pemilihan Umum 2020 dalam perspektif Imre Lakatos. Kebaruan ilmiah penelitian ini ada dalam dua kategori sumber referensi yang digunakan untuk memperoleh data, yakni jurnal terkait Pemilihan Umum 2020 dan jurnal terkait pemikiran program riset Imre Lakatos. Kebaruan ilmiah yang ditawarkan dari penulisan penelitian ini adalah analisis terhadap pelaksanaan Pemilu 2020 menggunakan perspektif program riset oleh filsuf Imre Lakatos.

Dampak-dampak pelaksanaan Pemilihan Umum 2020 yang dilaksanakan dalam masa pandemi akan dapat dianalisis berdasarkan komponen-komponen dari program riset Imre Lakatos. Konsep program riset akan menjadi alat saintifik untuk mengkaji Pemilu 2020 secara *close reading* (pembacaan dekat). Tujuan Memahami dampak penyelenggaraan Pemilu 2020 yang telah dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Upaya menganalisis program riset terkait solusi penanganan terhadap dampak pelaksanaan Pemilihan Umum 2020 dalam perspektif Imre Lakatos.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi (Nazir, 1988). Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Penelitian studi kasus ini, dalam konteks ini, menggunakan jurnal atau literatur yang berkaitan pada fokus serta kasus penelitian ini, yaitu jurnal mengenai sudut pandang dan pemahaman teori-teori Larry Laudan, jurnal mengenai kasus kasir yang dimarahi oleh orang tua anak yang melakukan top up game online, serta literatur yang menjelaskan

tentang peran dan juga pengawasan orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang seorang anak dibawah umur lakukan.

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini, pada poin pertama memberi gambaran tentang pelaksanaan pemilihan umum 2020 dan dampak yang ditimbulkan. Perencanaan pelaksanaan Pemilihan Umum 2020 selama masa pandemi memunculkan banyak kontra yang disebabkan oleh kecemasan masyarakat. Sejumlah survei telah dilakukan untuk menampung kekhawatiran masyarakat sebelum dilaksanakannya Pemilu 2020, dikutip melalui Parina dkk. (2021:47) antara lain yaitu: pertama, survei roda tiga konsultan (Mei 2020): 51,2% dari 1.200 responden mengharapkan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 ditunda hingga pandemi berakhir. Kedua, survei Indikator Politik Indonesia (Juli 2020): 63,1% responden menyarankan penundaan Pilkada serentak 2020 mengingat pandemi belum terkendali. Ketiga, survei Litbang Kompas (Juni 2020): hanya 64,8% pemilih akan menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2020.

Adapun kekhawatiran lain yaitu terkait politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), komitmen penyelenggara Pemilu, politik uang, adanya politik dinasti, hingga politik corporate (politik perusahaan). Pandemi memunculkan ketidakpastian terkait adanya calon pemimpin daerah yang layak. Adanya kasus politik uang yang dicukongi perusahaan telah mencederai kepercayaan masyarakat. Politik uang semakin berpotensi untuk terjadi ketika daya beli masyarakat melemah. Terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi mengakibatkan tingginya peluang masuk faktor uang (*money politic*) dalam mempengaruhi pilihan politik (Ristyawati, 2020; Permata, & Khasanah, 2020).

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2020 dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada 2020. KPU mendisiplinkan pematuhan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya, di mana jadwal pemilih diatur dan ditetapkan maksimal hanya 500 orang per TPS, wilayah TPS didesain berupa ruang terbuka dan disemprot disinfektan, dan petugas KPPS mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Pemilih juga diwajibkan memakai masker, mengenakan sarung tangan plastik yang diberikan, serta diukur suhu tubuhnya (Parina, dkk. 2021:46). Selain itu, sebelum penyelenggaraan, dilakukan tes rapid terhadap para calon petugas KPPS. Calon petugas yang reaktif dipastikan tidak bertugas dalam hari pelaksanaan. Hasilnya, KPU melakukan survei terhadap kepatuhan dalam Pilkada 2020 yang menunjukkan bahwa 89-96% pemilih telah mematuhi protokol kesehatan. Data per 16 Desember 2020 juga menunjukkan tidak adanya indikasi kenaikan kasus Covid-19 akibat pelaksanaan Pilkada 2020 (Marsella, Zaki, & Masburiyah, 2021).

Kekhawatiran terhadap menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2020 ternyata tidak terjadi. KPU pusat menargetkan partisipasi pemilih sebanyak 77,5% dalam masa pandemi. Di Provinsi Lampung misalnya, partisipasi masyarakat justru mengalami peningkatan, yakni mencapai rata-rata sebesar 74,31%. Ini meningkat sebesar 4,77% dibandingkan dengan Pilkada 5 tahun lalu dengan partisipasi sebanyak 69,54% (Parina, dkk. 2021:49).

Namun, regulasi teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 beberapa kali mengalami perubahan sehingga petugas penyelenggara harus melakukan penyesuaian. Akibatnya, pihak penyelenggara pun mengakui banyak celah dan kelemahan dalam tata laksana Pilkada 2020. Selain perubahan faktor regulasi, kondisi seperti keterlibatan ASN dan *money politic* yang marak juga menjadi masalah. Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan dilema bagi penyelenggara Pilkada, tetapi juga bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Warga yang terdampak secara ekonomi selama pandemi mengalami keterpurukan dan tentunya akan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini semakin membuka peluang bagi politik uang. Oleh karena itu, tindak antisipasi dan penanganan terhadap politik uang akan menjadi semakin sulit.

Parina dkk. (2021:47) menegaskan bahwa berdasarkan data lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020, meskipun hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat terkait penyebaran dan pembentukan klaster baru dari Covid-19 tidak terjadi, pelaksanaan Pemilu dalam masa

pandemi masih memunculkan masalah. Covid-19 mengganggu kondisi politik warga negara (Gultom, & Saragih, 2021) Keadaan pandemi semakin memberikan peluang terhadap tindakan praktik politik uang untuk semakin menguat dan meluas. Meskipun praktik jual-beli suara ini terjadi secara terang-terangan di tengah masyarakat, belum ada solusi terkait mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi masalah ini. Meski masyarakat menyaksikannya, tidak ada yang bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum (Husnulwati, 2021; Njoto, & Herryani, 2021).

Penjelasan deskriptif yang kedua yaitu program riset untuk mencari solusi penanganan terhadap dampak pelaksanaan pemilihan umum 2020 dalam perspektif Imre Lakatos. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang siapa itu Imre Lakatos. Imre Lakatos adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Hungaria. Ia dilahirkan di Debrecen, Hongaria pada 9 November 1922. Ia memperkenalkan konsep metodologi program riset dalam *Criticism and the Methodology of Scientific Research Programmes* (1968). Lakatos meninggal dunia pada 2 Februari 1974 di London, Inggris.

Program riset dalam pemikiran Imre Lakatos dilatarbelakangi oleh kritiknya terhadap pemikiran Karl Popper dan Thomas Kuhn. Menurut Lakatos, ilmu pengetahuan bukanlah mengenai persoalan benar dan salah dari pengumpulan dugaan yang kemudian mengarah pada penolakan seperti pandangan falsifikasi Popper. Ilmu pengetahuan memiliki peran yang mendalam untuk memecahkan masalah. Menurut Lakatos, ilmu pengetahuan tersebut merupakan sebuah program riset yang dihasilkan dan bersifat progresif (Guna & Ramadhani, 2021). Lakatos juga menentang konsep adanya revolusi ilmu pengetahuan dalam paradigma Kuhn, yang mana menurutnya perkembangan ilmu dapat terjadi melalui kontinuitas. Lakatos menawarkan konsep di mana keilmiahan suatu hal dinilai oleh rangkaian sejumlah teori yang terhubung dalam kontinuitas, bukan revolusi dari teori tunggal. Kontinuitas sendiri berperan penting dalam analisis sejarah. Maka, masalah pokok yang berhubungan dengan logika penemuan harus dikaji melalui program riset.

Maka, dapat disimpulkan bahwa Lakatos mengembangkan sebuah metodologi program riset dengan tiga bagian kerangka yang meliputi *hard core* (inti pokok), dan *protective belt* (lingkaran pelindung), dan *a series of theory* (serangkaian teori). Lakatos meyakini bahwa program riset ini mengandung aturan metodologis yang akan memberi arahan tentang langkah-langkah riset apa yang harus dihindari. Aturan tersebut dinamai sebagai heuristik negatif, sedangkan langkah yang harus diikuti dinamai dengan istilah heuristik positif.

Dengan demikian, program riset terkait peningkatan peluang untuk melakukan politik uang (*money politic*) akibat penyelenggaraan Pemilihan Umum selama masa pandemi Covid-19 dalam rangka mencari solusi mekanisme penanganan masalah dapat dianalisis melalui tiga kerangka pokok program riset yang dikembangkan oleh Lakatos. Maka, akan terbentuk analisis sebagai berikut: pertama, *hard core* (inti pokok). *Hard core* atau kerangka kerja merupakan bagian yang terdiri atas hipotesis teoritis umum yang berguna untuk membentuk dasar teori ilmiah dan membentuk ciri khas dari suatu program riset. Oleh karena itu, kerangka ini termasuk ke dalam heuristik negatif. Perkembangan maupun perubahan metodologis yang mungkin muncul tidak akan dapat membantah atau memodifikasi isi dari inti pokok, sehingga akan terlindungi dari ancaman falsifikasi. Maka, terdapat beberapa poin terkait dampak penyelenggaraan Pemilu 2020 dalam masa pandemi Covid-19 yang berperan sebagai *hard core* dalam program riset ini, yaitu: (1) pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap sektor pemerintahan; (2) perencanaan Pemilihan Umum 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember lalu menuai kontra dari masyarakat; dan (3) penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020 menimbulkan masalah ketidakadilan (Permata, & Khasanah, 2020).

Ketiga poin tersebut menjadi hipotesis umum yang juga akan berperan sebagai fondasi dari program riset ini. Setiap poin menjadi pokok penting yang menjadi ciri khas program riset, sehingga akan menjadi acuan yang menentukan jalannya proses riset. Selain itu, ketiga poin sebagai hipotesis

teoritis umum yang selanjutnya akan diperkuat dengan *protective belt* tidak akan terbantahkan oleh falsifikasi (Rofiq, 2010; Assya'bani, 2020).

Analisis kedua setelah *hard core* adalah *protective belt* (lingkaran pelindung). Lingkaran pelindung berfungsi sebagai hipotesis bantu. Kerangka ini harus bisa menahan berbagai pengujian, penyesuaian, hingga perubahan. Lingkaran pelindung disebut dengan “heuristik positif”, terdiri dari saran atau isyarat tentang bagaimana memodifikasi dan meningkatkan fleksibilitas lingkaran pelindung serta bagaimana mengembangkan varian yang kompleks. Maka, lingkaran pelindung akan melengkapi inti pokok dari program riset agar dapat bisa meramalkan dan menerangkan fenomena-fenomena yang nyata. Dengan mengalihkan sasaran falsifikasi kepada asumsi lain, maka suatu teori dapat dilindungi dari ancaman falsifikasi (Guna & Ramadhani, 2021:142). Dalam kajian ini, lingkaran pelindung terdiri atas: (1) pandemi Covid-19 mengganggu rencana penyelenggaraan Pemilu 2020; (2) masyarakat menilai pengunduran Pemilu 2020 pada 9 Desember lalu tidak realistis; dan (3) politik uang (*money politic*) menjadi salah satu permasalahan yang muncul.

Analisis ketiga yaitu *a series of theory* (serangkaian teori). Serangkaian teori mengacu pada teori terkait akibat dari hipotesis bantu. Rangkaian ini akan menjelaskan bahwa suatu teori tersebut saling berkaitan sehingga dapat dinilai sebagai ilmiah atau tidak ilmiah. Maka, akan diperoleh tiga poin rangkaian teori, yaitu: (1) pandemi Covid-19 mengakibatkan regulasi teknis Pemilihan Umum 2020 berubah-ubah; (2) masyarakat khawatir akan muncul klaster baru penyebaran virus Covid-19 apabila Pemilu 2020 tetap dilaksanakan; dan (3) akibat keterpurukan ekonomi masyarakat di masa pandemi, terjadi jual-beli suara pada masa Pemilihan Umum 2020.

## Simpulan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020 telah memperoleh banyak penolakan karena dinilai tidak realistis. Meskipun pembentukan klaster baru Covid-19 dalam Pemilu 2020 akhirnya tidak terjadi, pelaksanaan Pemilu dalam masa pandemi masih memunculkan masalah, yakni memberikan peluang terhadap praktik politik uang atau jual-beli suara. Tidak adanya solusi terkait mekanisme yang jelas untuk menangani masalah ini menjadi urgensi dalam kelancaran demokrasi Indonesia. Maka, diperlukan pelaksanaan program riset dalam rangka mencari solusi terhadap masalah ini berdasarkan pemikiran Research Programme filsuf Imre Lakatos. Saran, sistem penanganan terhadap praktik politik uang perlu untuk segera diperoleh demi memelihara keadilan dalam pemerintahan Indonesia yang demokratis. Maka, program riset dalam rangka mencari solusi dalam menangani praktik politik uang harus segera dilakukan.

## Referensi

- Assya'bani, R. (2020). Methodology of Scientific Reseach Programmes Imre Lakatos: Implikasi Terhadap Studi dan Pendidikan Islam. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 218-231.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2021). Pandemi Covid-19 Studi Rawan Konflik Pilkada 2020 Dan Perilaku Politik Masyarakat.
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta.
- Guna, A. S. F., & Ramadhani, F. (2021). Metodologi Program Riset Imre Lakatos. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 4(1).
- Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *'Adalah*, 4(1).
- Haridison, A., Sandi, J. R. A., Suprayitno, S., & Jaya, I. (2021). Regional Election and Covid-19: Evidence in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1597-1606.
- Husnulwati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19. *Solusi*, 19(1), 67-76.

- Marsella, A., Zaki, M., & Masburiyah, M. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020 (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Mohamad, G. (2020). Polemik Sains. IRCISOD.
- Njoto, H., & Herryani, M. R. T. R. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19 Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *Transparansi Hukum*, 4(2).
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 93-105.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85-96.
- Rofiq, A. C. (2010). Signifikansi Teori-Teori Popper, Kuhn, Dan Lakatos Terhadap Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman. *Ulumuna*, 14(1), 177-196.
- Sarjan, S., Mulya, K. A. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 59-76.
- Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 186-203.